

JURNAL

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR**



Oleh:

ARYL MASRUOH

13.1.02.01.0296

Dibimbing oleh :

- 1. Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA., ACPA**
- 2. Amin Tohari, M.Si**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2017




**SURAT PERNYATAAN**
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama Lengkap : Aryl Masuroh
NPM : 13.1.02.01.0296
Telepon/HP : 083846610220
Alamat Surel (Email) : avrylia.kurnia@gmail.com
Judul Artikel : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
Fakultas – Program Studi : FE – Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. K.H. Achmad Dahlan No.76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiatisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 29 Januari 2018
Pembimbing I  <u>Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA., ACPA</u> NIDN : 0713026101	Pembimbing II  <u>Amin Tohari, M.Si</u> NIDN : 0715078102	Penulis,  <u>Aryl Masuroh</u> NPM. 13.1.02.01.0296

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Aryl Masruroh

13.1.02.01.0296

FE - Akuntansi

avrylia.kurnia@gmail.com

Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA., ACPA dan Amin Tohari, M.Si

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Setiap daerah memiliki kemampuan masing-masing untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memaksimalkan dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki atas dasar inisiatif dan kemampuan daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Secara teori desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015 yang berjumlah 38 daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampel* yang kemudian didapatkan 37 sampel perusahaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *Moderate Regression Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Adjusted R²* sebesar 0.788 yang berarti bahwa 78,8% yang artinya bahwa semua variabel independen mampu menjelaskan Belanja Modal sebesar 78,8%.

KATA KUNCI : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal.

I. LATAR BELAKANG

Setiap daerah memiliki kemampuan masing-masing untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memaksimalkan dan mengembangkan potensi daerah yang

dimiliki atas dasar inisiatif dan kemampuan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan

pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif.

Pemerintah daerah Jawa Timur masih kurang mengupayakan untuk peningkatan pelayanan publik, namun lebih mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya akan dialokasikan bukan untuk pembangunan infrastruktur publik melainkan untuk belanja rutin lainnya yang bersifat kurang produktif. Selain itu belanja modal juga lebih diprioritaskan untuk belanja impor dari pada belanja dalam negeri meskipun sebenarnya dalam negeri sendiri sudah memiliki barang tersebut.

Faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Namun Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan belanja modal di proses pembangunan. Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Peningkatan anggaran modal akan menyebabkan peningkatan belanja modal pada infrastruktur.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dalam penelitian ini, peneliti memberikan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Jawa Timur”**.

II. METODE

Identifikasi Variabel Penelitian Variabel Terikat

Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Belanja Modal.

Variabel Bebas

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), dan Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2).

Variabel Moderasi

Variable moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Z).

Pendekatan dan Teknik Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:12), pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka, dan dianalisis menggunakan statistik.

Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah *ex-post-facto*. Menurut Wirartha (2006:169) “penelitian *ex-post-facto* adalah penelitian sesudah kegiatan, ada pula yang menyebutkan *kausal-komparatif*”. Penelitian *ex-post-facto* bertujuan mengekspos kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi yaitu Belanja Modal (Y) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), dan Dana Alokasi Umum (X_2) yang nantinya diharapkan hasil dari

penelitian ini dapat dijadikan pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam pemberian dana kepada daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013-2015 yaitu sebanyak 38 Kabupaten/Kota.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Menurut Sugiyono (2013:152) teknik *non probability sampling* yaitu cara untuk menentukan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:154) metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria penarikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015

b. Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015 yang mengalami pertumbuhan selama periode tahun penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka jumlah anggota sampel yang diteliti adalah $37 \times 3 = 111$ anggota sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *File Research* (Study Lapangan) dan *Library Research* (Studi Perpustakaan)

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Tabel 1

**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{ab}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,28249254
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,034
Kolmogorov-Smirnov Z		,497
Asymp. Sig. (2-tailed)		,966

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Untuk analisis statistik dapat dilihat dari tabel diatas nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan. yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Nilai signifikan tersebut sebesar 0.966. Dari hasil tersebut

menunjukkan bahwa *Unstandardized Residual* terdistribusi normal.

Multikolinearitas

**Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
PAD	,247	4,049
DAU	,411	2,432
PE	,863	1,159
PAD*PE	,354	2,822
DAU*PE	,565	1,769

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data diolah, 2017

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa variabel PAD, DAU, PE, PAD*PE, DAU*PE mempunyai *tolerance* sebesar 0.247, 0.411, 0.863, 0.354, dan 0.565 dan nilai VIF masing-masing sebesar 4.049, 2.432, 1.159, 2.822, dan 1,769 Hal ini berarti pada variabel PAD, DAU, PE, PAD*PE dan DAU*PE tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) karena memiliki nilai *cut off tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10.

Autokorelasi

**Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,28914	2,016

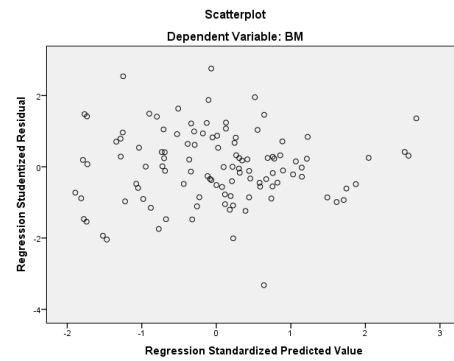
a. Predictors: (Constant), PER, ROA, CR, TATO, DER

b. Dependent Variable: EPS

Sumber : Data diolah, 2017

Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji autokorelasi. Menurut Ghozali dalam tabel *Durbin-Watson test* adalah jika nilai DW berada pada $du < d < 4 - du$ maka tidak ada autokorelasi. Berdasarkan tabel 4.3 lai $d = 2,016$ lebih besar dari nilai $d_U = 1.7463$ dan kurang dari $4 - 1.7463 = 2.537$ atau $1.7463 < 2,016 < 2.537$, sehingga model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi.

Heteroskedastisitas



Gambar 1
Grafik Scaterplots

Sumber : Data diolah, 2017

Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 1 yang ditunjukkan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi

Tabel 4
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,893 ^a	,798	,788	,28914	2,016

a. Predictors: (Constant), DAU*PE, PE, PAD*PE, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4 diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0.788. Dengan demikian menunjukkan bahwa PAD, DAU, PE, PAD*PE, dan DAU*PE mampu

menjelaskan belanja modal sebesar 78,8% dan sisanya yaitu 21,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4,503	1,652		-2,725	,008
PAD	,234	,069	,298	3,378	,001
DAU	,957	,114	,574	8,383	,000
PE	,361	,149	,114	2,422	,017
PAD*PE	,166	,044	,280	3,793	,000
DAU*PE	-,190	,060	-,183	-3,140	,002

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data diolah, 2017

Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikansi secara parsial) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Interaksi Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi, dan interaksi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh diperoleh nilai signifikan sebesar 0.001, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Nilai signifikan uji t variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0.000, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan Dana

Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Nilai signifikan variable Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.017, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Nilai signifikan variabel Interaksi Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel PAD*PE < 0,05 yang berarti pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Jika dilihat dari nilai beta variabel PAD*PE hasilnya adalah positif, hal ini berarti moderasi pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Nilai signifikan variabel Daa Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel $DAU*PE < 0,05$ yang berarti pertumbuhan ekonomi dapat

memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Jika dilihat dari nilai beta variabel $DAU*PE$ hasilnya adalah negatif, hal ini berarti moderasi pertumbuhan ekonomi memperlemah pengaruh DAU terhadap belanja modal.

Tabel 6
Hasil Uji F (simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34,660	5	6,932	82,916	,000 ^b
	Residual	8,778	105	,084		
	Total	43,438	110			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), $DAU*PE$, PE, $PAD*PE$, DAU, PAD

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diatas diperoleh nilai signifikan adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji F variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pertumbuhan Ekonomi, Interaksi Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal

Sesuai dengan UU No.33 tahun 2004 yang menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan daerah

asli yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang dapat digali dari daerah tersebut dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meminimalisir ketergantungan dana dari pemerintah pusat yang terdiri dari beberapa macam pendapatan yaitu Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, agar pemerintah daerah tidak mengeksploitasi PAD dengan membuat kebijakan pungutan baru yang mungkin dapat membebani masyarakat. Selain itu Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun

akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Supadmi (2014), Ardhini (2011), Sulistyowati (2011) dan Fitri (2013) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk

memeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini bisa dikatakan suatu daerah masih kurang mandiri dalam mengelola daerahnya atau cenderung bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum dalam mendanai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh penerimaan Dana Alokasi Umum. Sehingga daerah dengan pengalokasian DAU yang tinggi, maka pengalokasian Belanja Modal daerah tersebut juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Supadmi (2014), Ardhini (2011), dan Solikin (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap

Belanja Modal. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal

Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita, jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Menurut Hasan (2012) pertumbuhan ekonomi merupakan

parameter dari kegiatan pembangunan hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi mampu mengukur tingkat perkembangan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah barang dan jasa sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat (Putro, 2010).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013), Jaeni (2016) serta Taiwo dan Abayomi (2011) yang menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011), Maharani (2010) dan Putro (2010) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

4. Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD*PE memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal sehingga hipotesisnya diterima. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. NI Luh (2014) memperoleh hasil positif antara pertumbuhan ekonomi

dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka akan mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah.

5. Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Sugiardi dan Supadmi (2014), besarnya pertumbuhan ekonomi dapat memperlemah pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka pengaruh DAU terhadap Belanja Modal semakin menurun. Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadap Belanja Modal maka berdampak pada hubungan DAU dengan Belanja Modal. Walaupun pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergolong baik, hal ini tidak dapat menjadi indikator pengalokasian DAU untuk Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga dana tersebut lebih diutamakan

untuk pendanaan lain yang tidak termasuk Belanja Modal.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pertumbuhan Ekonomi, Interaksi Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi, dan Interaksi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, PE, PAD*PE dan DAU*PE berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh nilai signifikan uji F sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan PAD, DAU, PE, PAD*PE dan DAU*PE berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan nilai koefisien determinasi *Adjusted R²* sebesar 0.788 yang berarti bahwa 78.8% dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen dan sisanya yaitu 21.2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Serta untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Dari hasil pengujian didapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu

memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

5. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
6. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pertumbuhan Ekonomi, Interaksi Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi, dan Interaksi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Nilai R^2 Square Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sebesar 78,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini sebesar 21,2%.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Fitri, V. K. 2013. *Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi riau*

- Tahun 2009-2012*. Universitas Riau. Riau
- Hasan, T.I.B. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh*. Journal SAINS Riset, 1(1).
- Jaeni. 2016. *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal*. Universitas Stikubank Semarang.
- Kusnandar, dan Siswantoro, D. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Labih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. SNA XV Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Solikin, I. 2010. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Jawa Barat*.
- Sugiarthi, N. P. D. E. R. dan Supatmi, N. L. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. Universitas Udayana. Bali
- Sugiarthi, N. P. D. E. R. dan Supatmi, N. L. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. Universitas Udayana. Bali
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sularno, F.M. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Sulistyowati, D. 2011. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja*



- modal*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Taiwo, M. dan Taiwo A. 2011. *Government Expenditure and Economic Development*. *European Journal of Business and Management*, 3(9).
- Undang-Undang RI No. 32 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 32 tentang *Pemerintah Daerah*.
- UU No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Yovita, F. M. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.